



MENUJU PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI SELATAN YANG LEBIH INKLUSIF

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

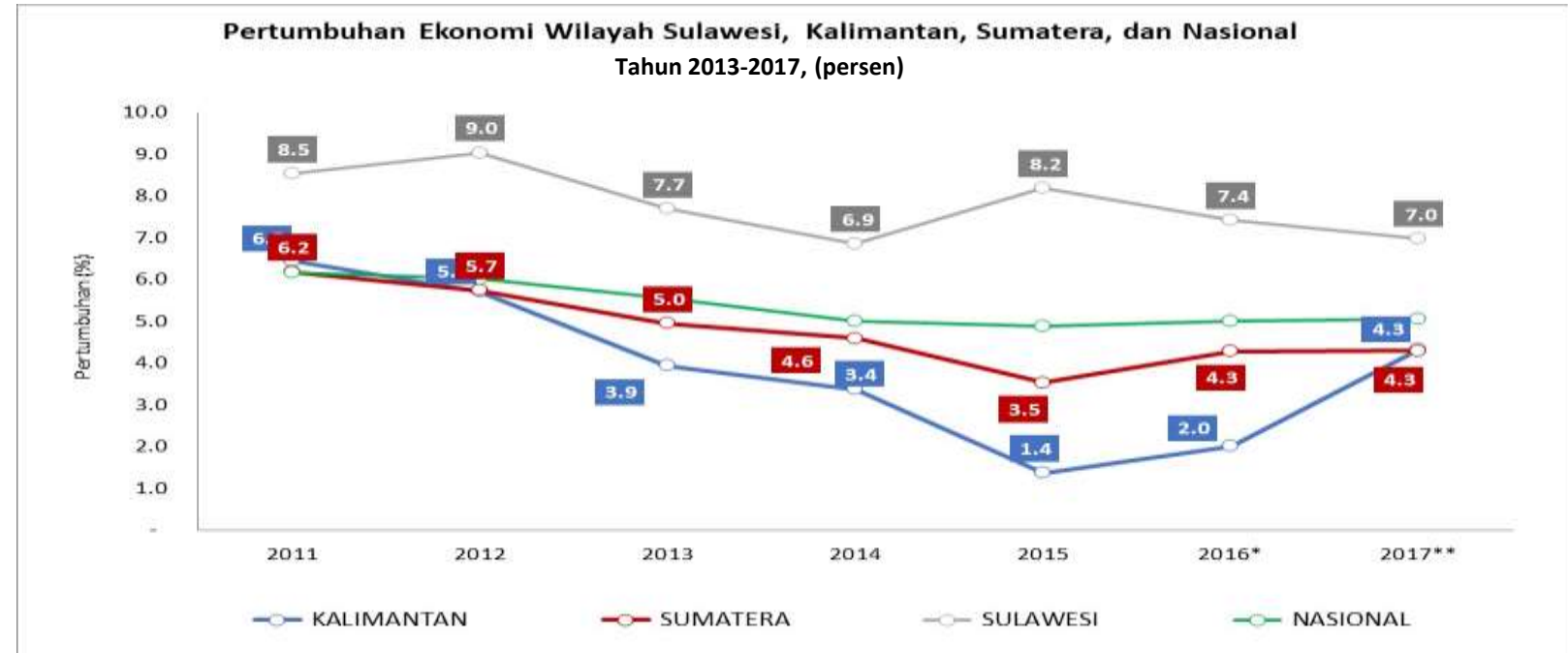
**Disampaikan dalam Acara Forum Pembangunan Daerah
Makassar, 8 Mei 2018**

- Pembangunan Ekonomi Sulawesi**
- Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan**
- Pembangunan Ekonomi Inklusif Sulawesi Selatan**
- Peranan SDGs/TPB Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif**
- Kebijakan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan**
- Penutup**

1. Pembangunan Ekonomi Sulawesi

Ekonomi Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, Wilayah Sumatera dan Kalimantan
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2013-2017:

- Sulawesi 7.43%
- Kalimantan 3.01%
- Sumatera 4.33%
- Nasional 5.11%



Propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat menjadi pendorong utama kenaikan pertumbuhan Sulawesi ...

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011-2017
Sulut	6.2	6.9	6.4	6.3	6.1	6.2	6.3	6.3
Gorontalo	7.7	7.9	7.7	7.3	6.2	6.5	6.7	7.2
Sulbar	10.7	9.2	6.9	8.9	7.3	6.0	6.7	8.0
Sulteng	9.8	9.5	9.6	5.1	15.5	10.0	7.1	9.5
Sulsel	8.1	8.9	7.6	7.5	7.2	7.4	7.2	7.7
Sultra	10.6	11.7	7.5	6.3	6.9	6.5	6.8	8.0
Sulawesi	8.5	9.0	7.7	6.9	8.2	7.4	7.0	7.8
Nasional	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1	5.4

Pendorong Pertumbuhan Sulawesi dari Sisi Produksi:

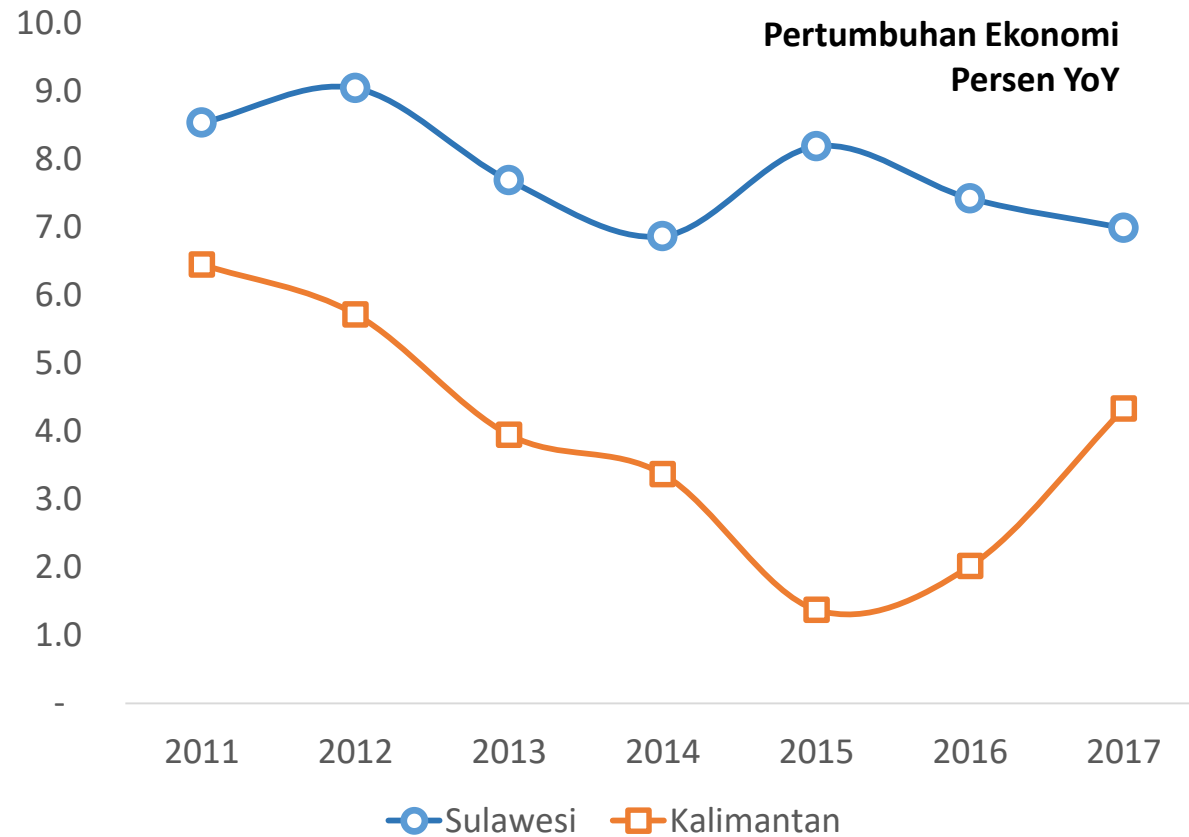
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil di Sulawesi ditopang oleh meningkatnya kinerja semua sektor.

LAPANGAN USAHA	Pertumbuhan (%)							Rata-rata 2011- 2017
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.10	5.40	5.60	7.90	4.70	5.90	5.50	5.70
Pertambangan dan Penggalian	12.90	18.10	10.90	-4.00	12.00	8.20	10.30	9.80
Industri Pengolahan	8.60	7.70	7.70	9.10	13.30	10.50	6.70	9.10
Pengadaan Listrik dan Gas	9.40	15.70	10.10	16.40	3.50	11.90	6.30	10.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.40	6.40	6.70	4.50	2.60	5.70	5.20	5.80
Konstruksi	9.00	9.60	10.10	9.80	11.30	5.40	6.60	8.80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.10	9.70	7.70	8.10	7.20	8.60	8.50	8.60
Transportasi dan Pergudangan	9.90	10.00	6.70	5.80	7.40	8.10	7.00	7.80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.70	9.90	7.40	8.60	7.00	9.20	9.60	8.60
Informasi dan Komunikasi	10.10	16.40	12.50	7.10	8.30	8.60	9.40	10.30
Jasa Keuangan dan Asuransi	17.20	13.40	8.40	5.20	6.80	15.40	5.50	10.30
Real Estat	9.50	8.70	7.80	8.00	7.10	5.90	5.10	7.40
Jasa Perusahaan	9.60	8.20	7.90	6.90	6.10	7.30	7.70	7.70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.60	5.70	4.30	6.50	7.70	3.00	4.80	5.50
Jasa Pendidikan	10.20	8.00	7.80	6.50	7.20	7.10	7.60	7.80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.20	9.40	7.50	9.10	8.40	7.90	7.70	8.50
Jasa lainnya	7.60	8.30	6.70	8.10	8.10	8.40	7.50	7.80
PDRB	8.50	9.00	7.70	6.90	8.20	7.40	7.00	7.80

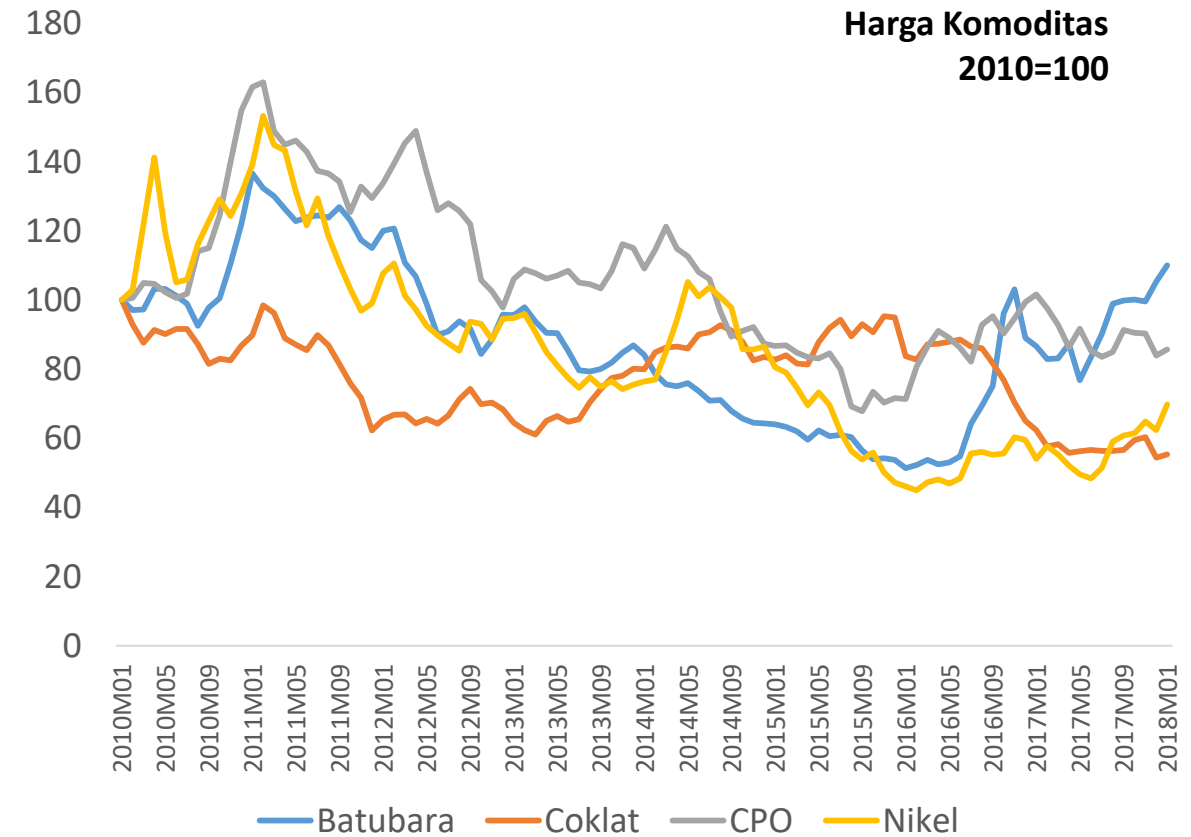
Dari sisi produksi,

- pertumbuhan ekonomi Sulawesi didorong kuat oleh sektor industri didukung oleh sektor pertanian.
- Sektor industri tumbuh rata-rata 9,1% per tahun dan sektor pertanian 5,7% per tahun.
- Pertumbuhan sektor industri terutama didorong oleh industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta industri logam dasar (terkait dengan hilirisasi tabang) yang meningkat rata-rata 8,5%, 7,0%, dan 27,5% per tahun.
- Pertumbuhan sektor pertanian terutama didorong oleh subsektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang meningkat rata-rata 4,7%, 6,8%, 8,2%, dan lebih dari 5,0% per tahun.
- Wilayah Sulawesi yang kaya mineral mendorong sektor pertambangan dan penggalian tumbuh rata-rata 9,8% per tahun.
- Sektor tersier tumbuh rata-rata 8,3% per tahun

Berakhirnya era boom komoditas berdampak terhadap Sulawesi, tetapi tidak sebesar dampaknya terhadap Kalimantan ...



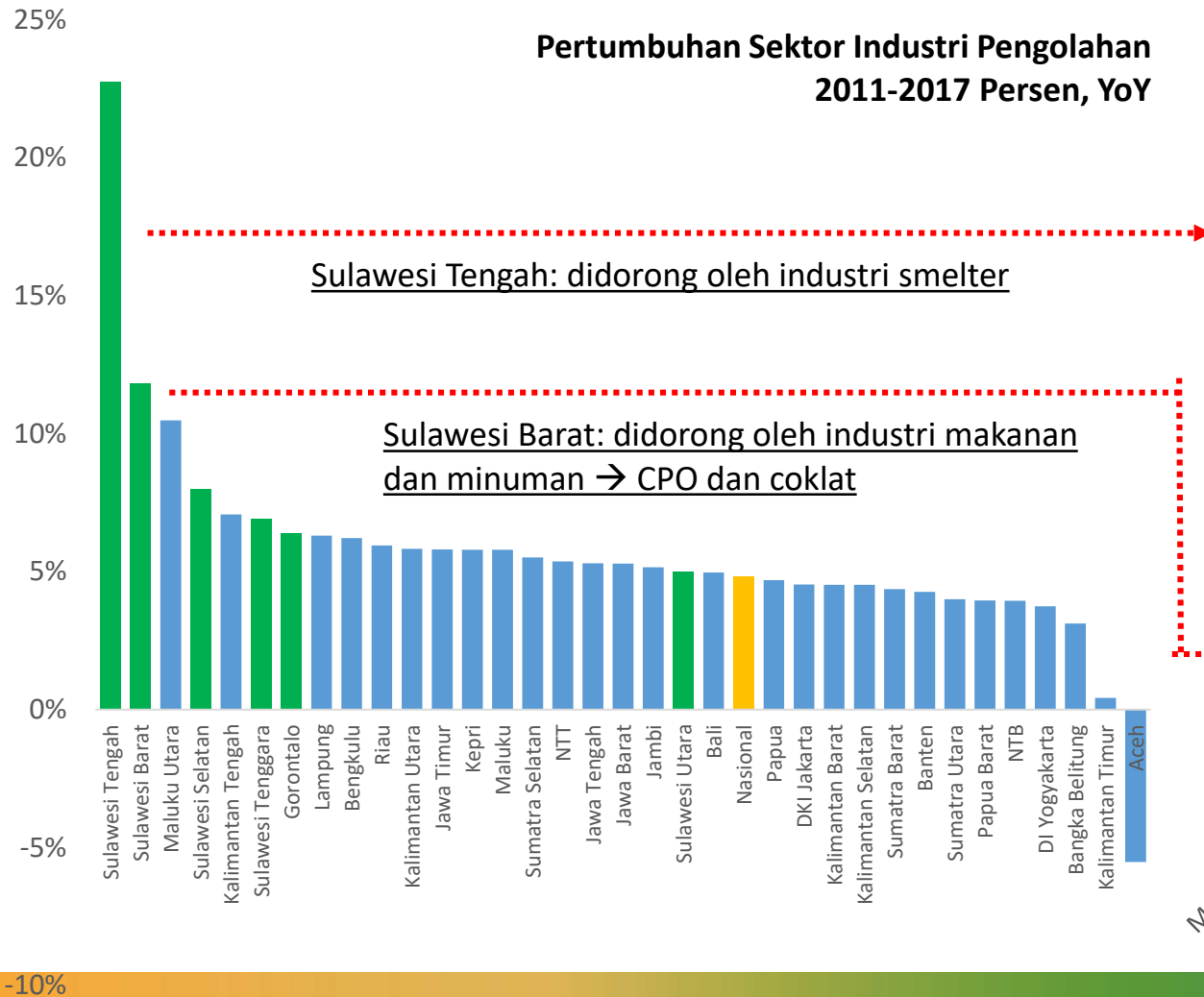
Perbedaan perubahan harga komoditas di Sulawesi dan Kalimantan hanya bisa menjelaskan sedikit perbedaan tersebut. Meski harga coklat dan CPO relatif turun lebih sedikit dibandingkan dengan batubara, tetapi nikel mengalami tekanan cukup besar pada tahun 2015.



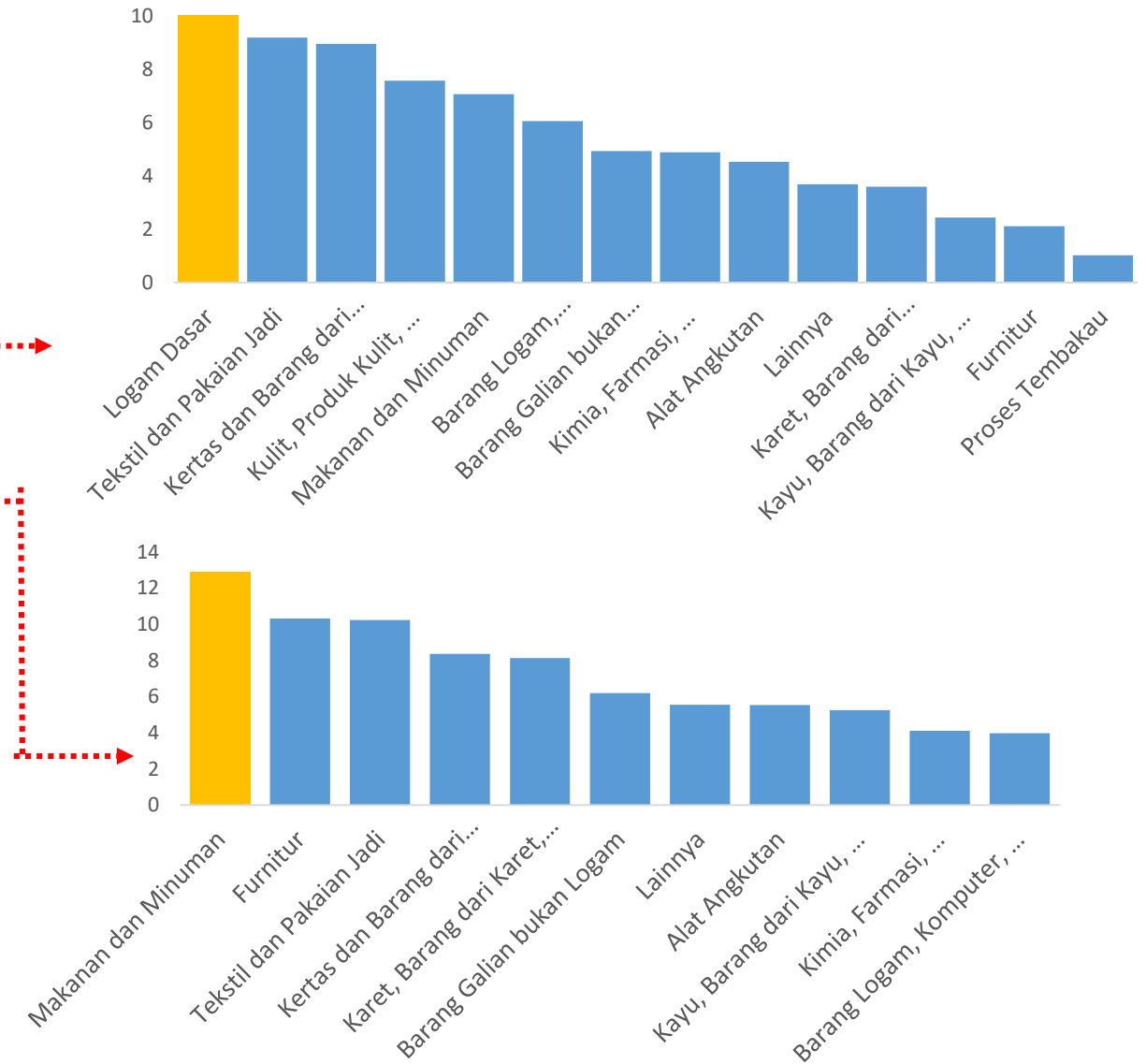
Pertumbuhan Industri Pengolahan di Sulawesi lebih Tinggi dari Nasional...

Pertumbuhan industri pengolahan terbesar terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat → berbasis sumber daya alam ...

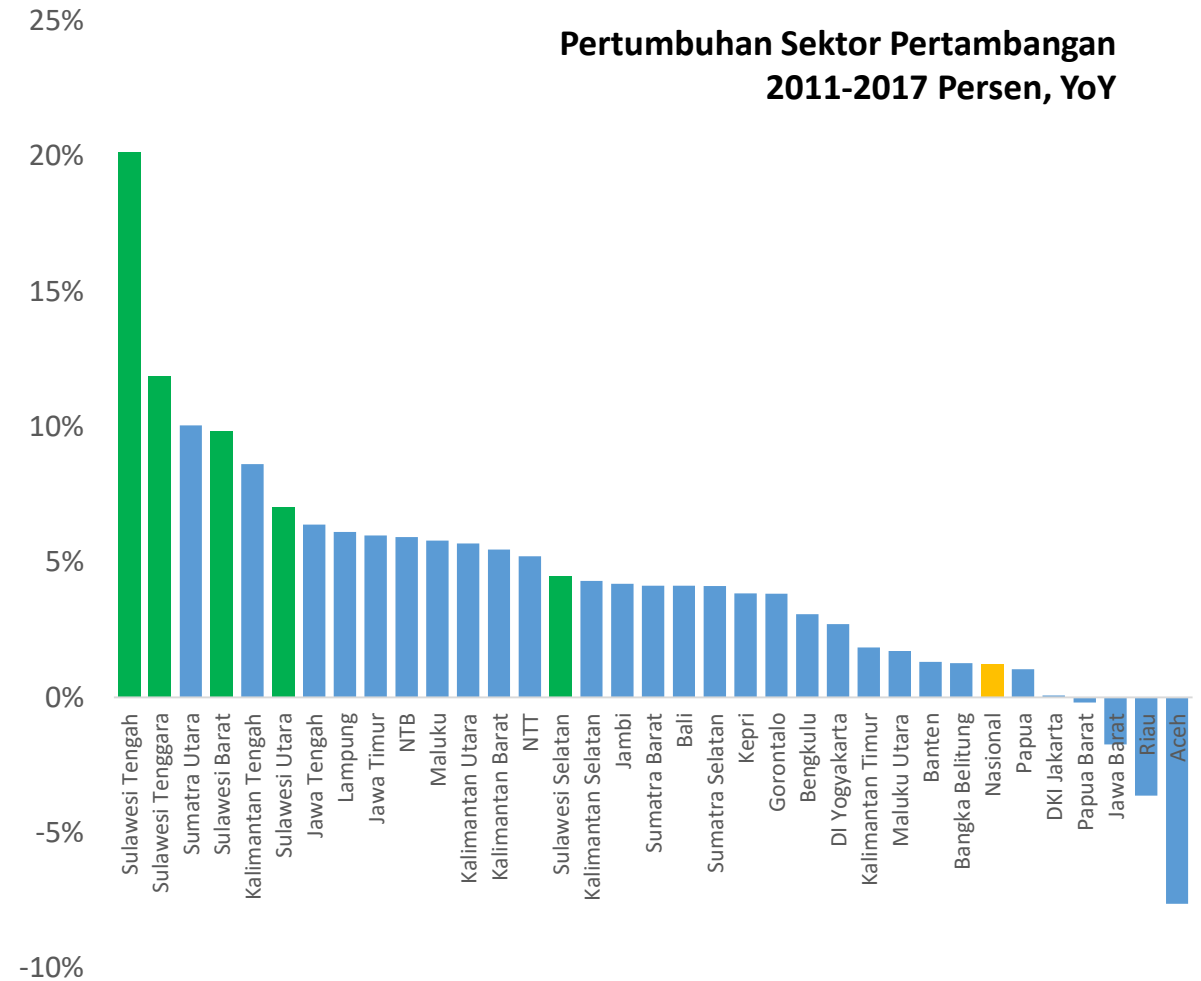
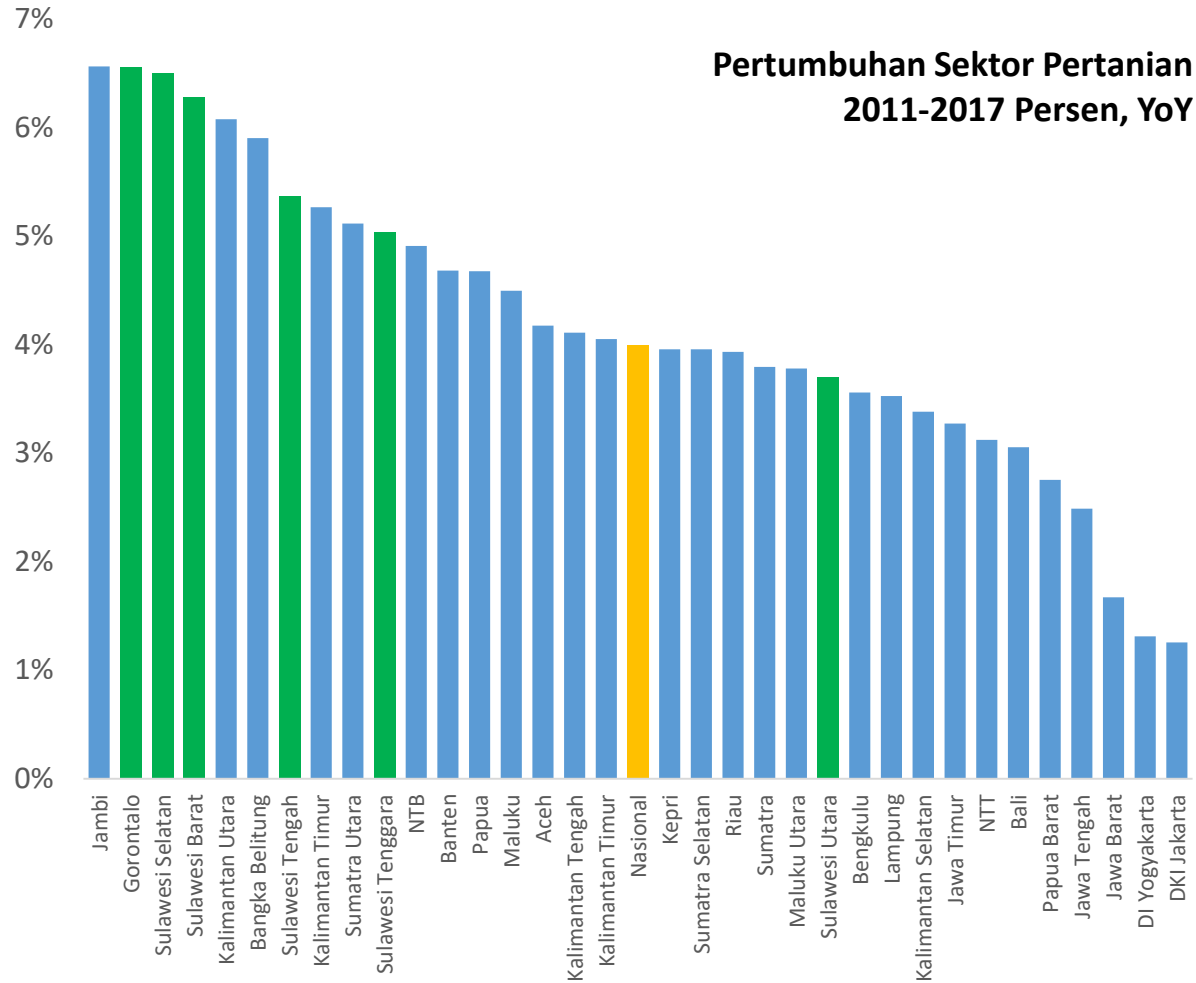
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 2011-2017 Persen, YoY



Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan 2011-2016 (Persen, YoY)



Tumbuhnya industri pengolahan berbasis SDA berdampak pada peningkatan permintaan output sektor pertanian dan pertambangan di Sulawesi. Kondisi ini juga mengurangi dampak negatif turunnya harga komoditas internasional, karena komoditas diserap oleh sektor industri domestik ...



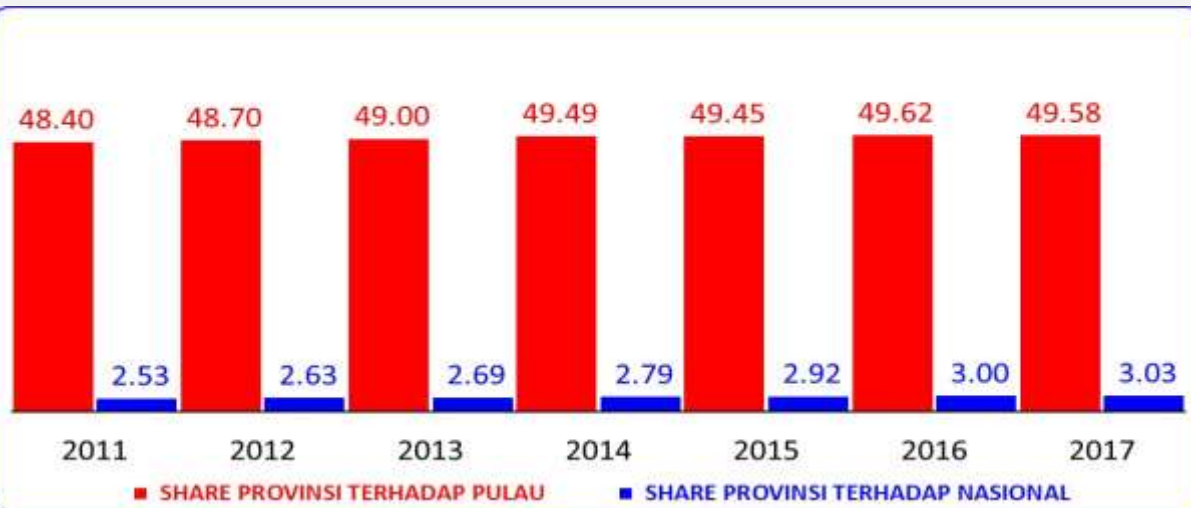
2. Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan Ekonomi dan *Share* Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Pulau dan Nasional

Pertumbuhan Ekonomi **PROVINSI** dan **NASIONAL**



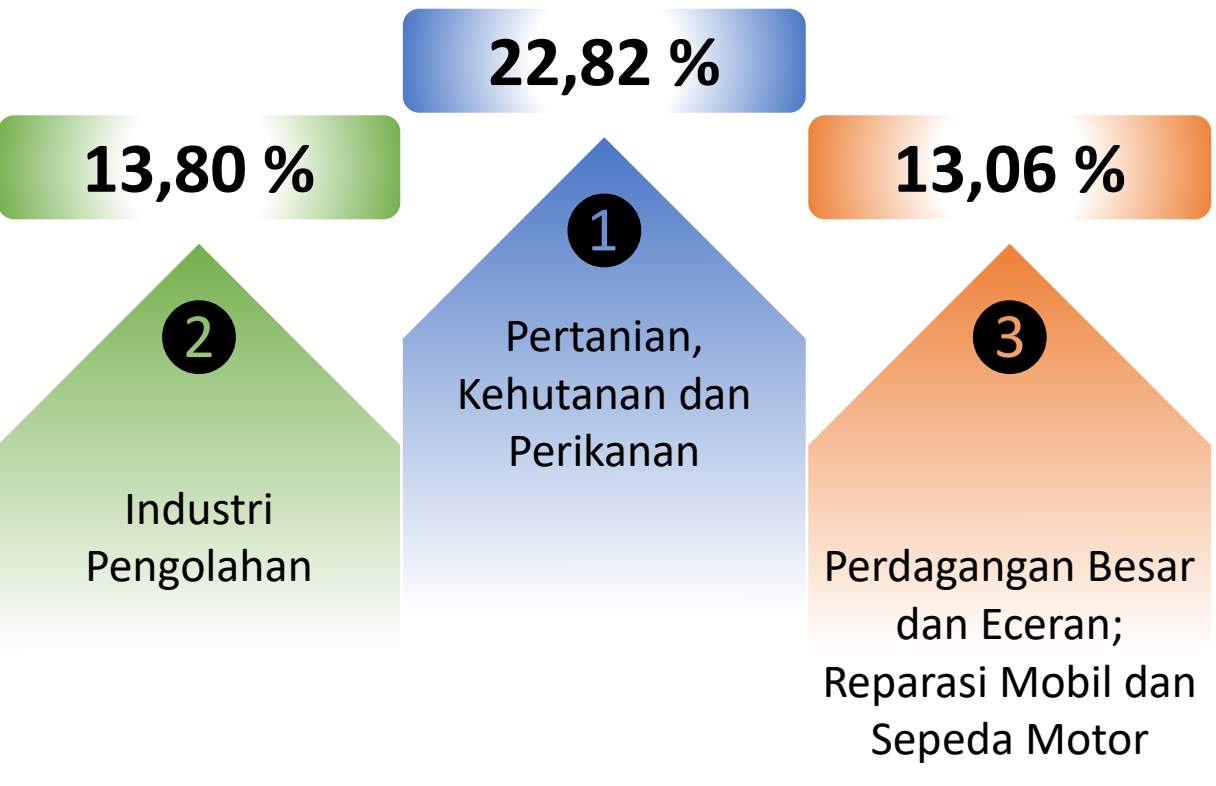
Share Provinsi terhadap **PULAU** dan **NASIONAL**



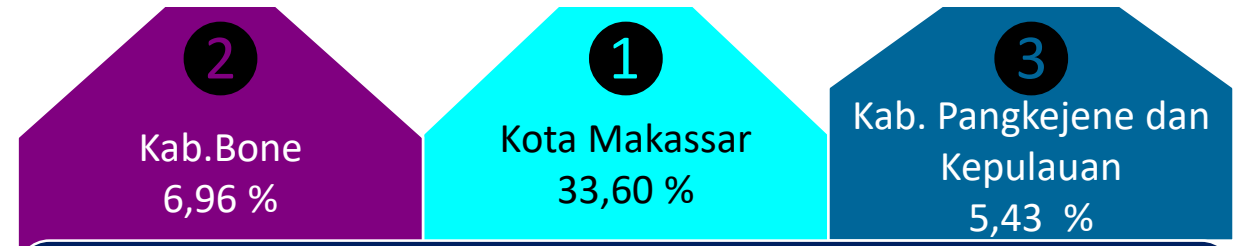
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



Share Sektor dan Kabupaten / Kota 3 Terbesar



SHARE SEKTOR DENGAN RATA-RATA 3 TERBESAR TAHUN 2012 S/D 2016

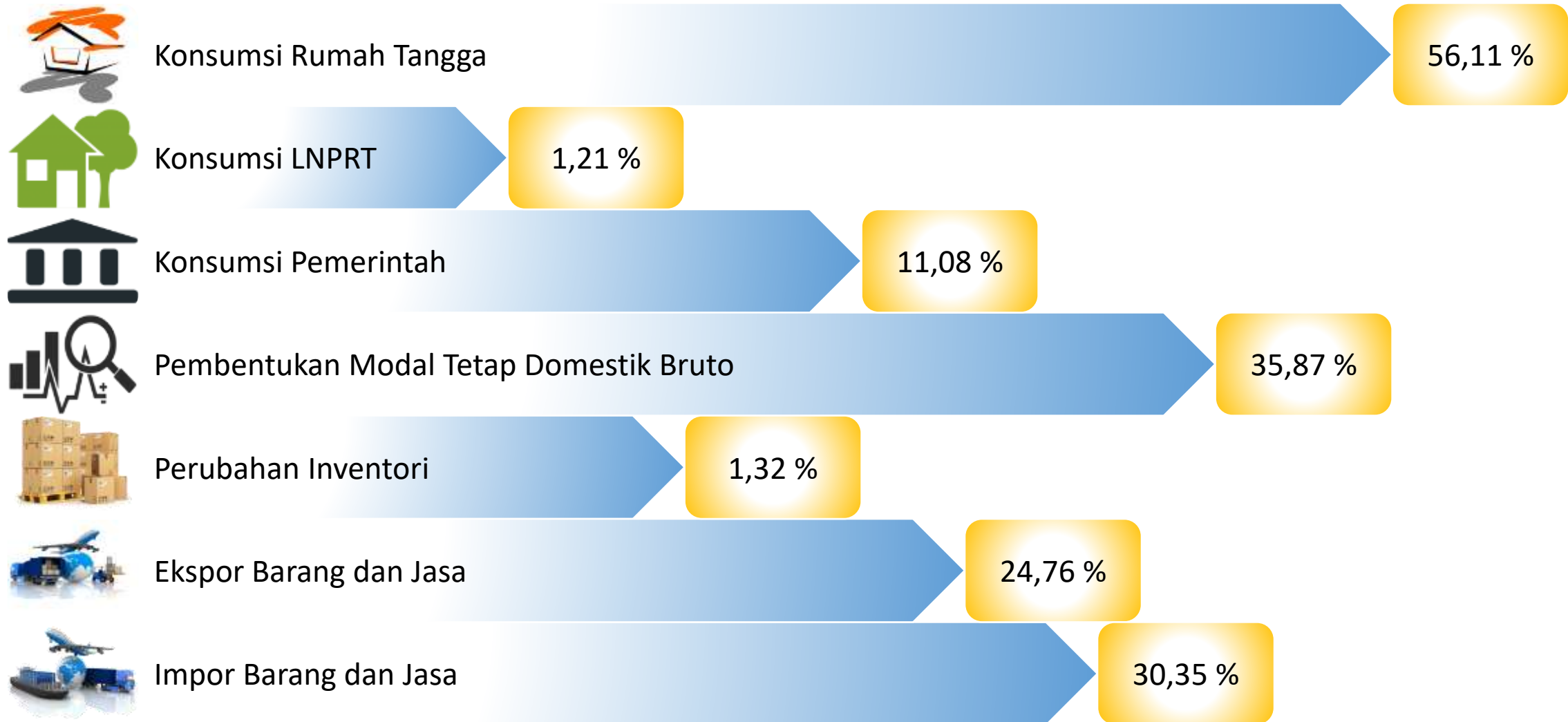


SHARE KABUPATEN / KOTA 3 TERBESAR TAHUN 2016




TERENDAH: Kab. Kepulauan Selayar 1,23 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata *Share* PDRB – ADB Menurut **Pengeluaran** Tahun 2010 – 2016 (6th)



3. Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Sulawesi Selatan

		Baseline 2015	Realisasi	RPJMN 2019
Tingkat Pengangguran Terbuka		6,18 %	5,3% Feb 2017	4,0-5,0 %
Tingkat Kemiskinan		11,22%	10,6% Maret 2017	7-8 %
Gini Rasio		0,408	0,393 Maret 2017	0,36

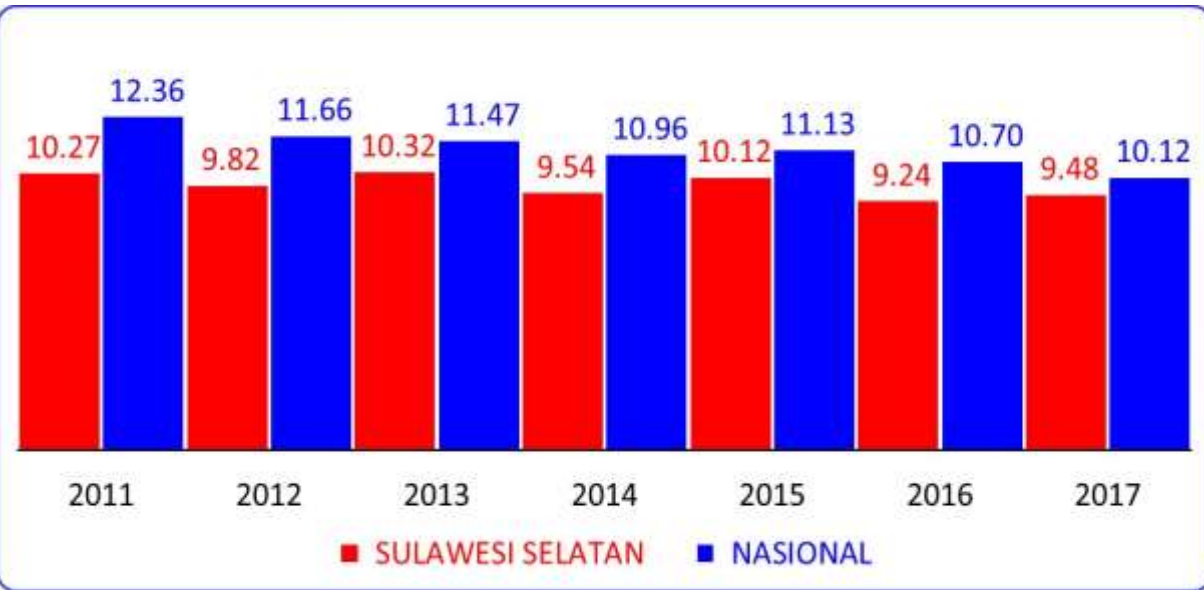
Arahan Presiden:
Pengurangan ketimpangan menjadi Fokus Pembangunan

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

3 Kelompok
Kebijakan
dalam RPJMN
2015-2019



Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan



**TINGKAT KEMISKINAN
PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2011 S/D 2017
"PERIODE SEPTEMBER"**

2

Kab. Jeneponto
15,49 %

1

Kab. Pangkajene dan
kepulauan
16,22 %

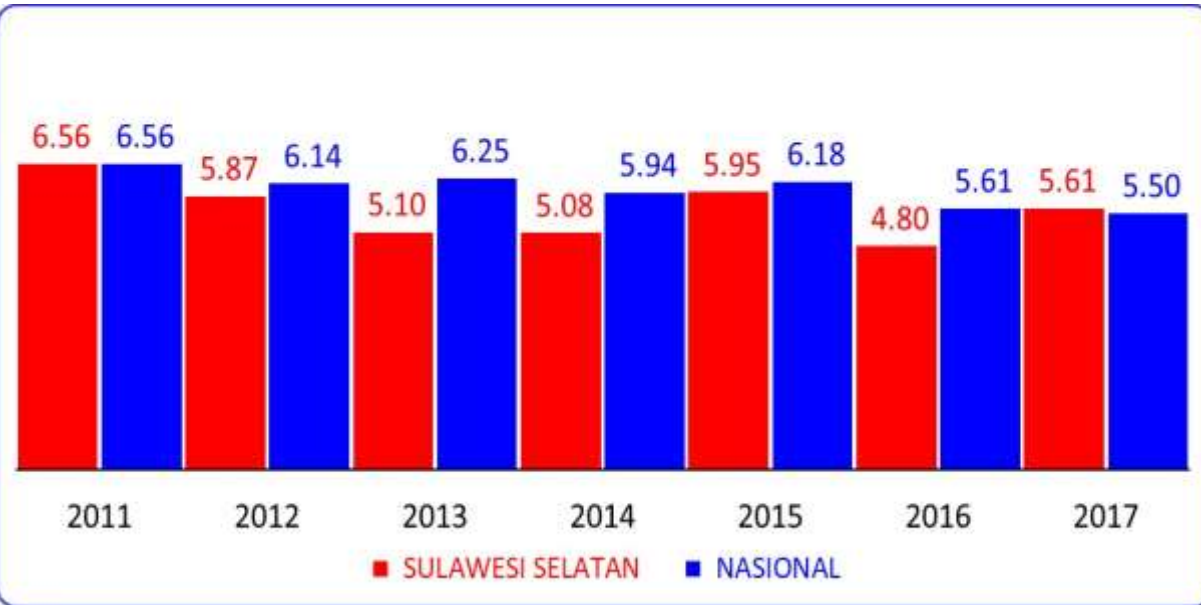
3

Kab. Luwu Utara
14,36 %

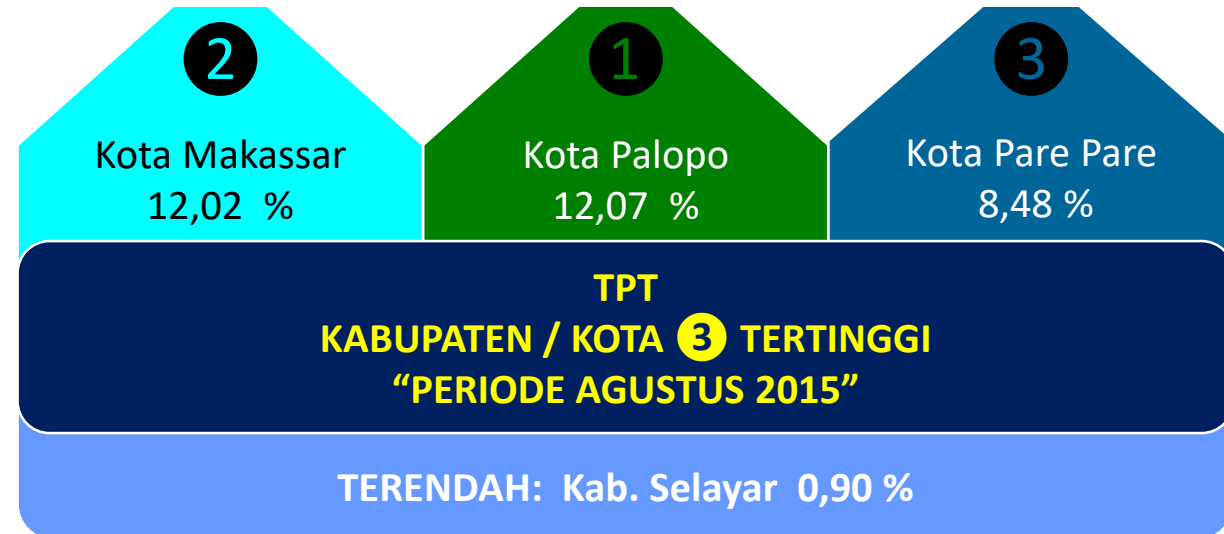
**TINGKAT KEMISKINAN
KABUPATEN / KOTA 3 TERTINGGI
"PERIODE MARET 2016"**

TERENDAH: Kota Makassar 4,56 %

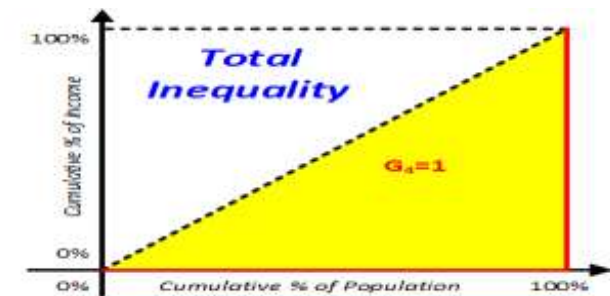
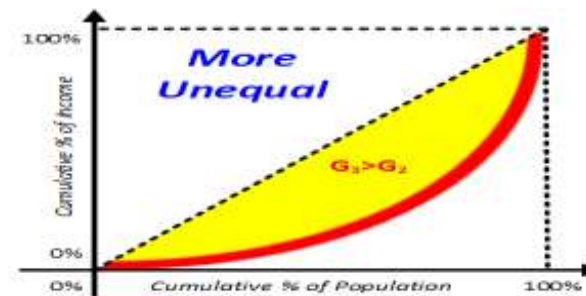
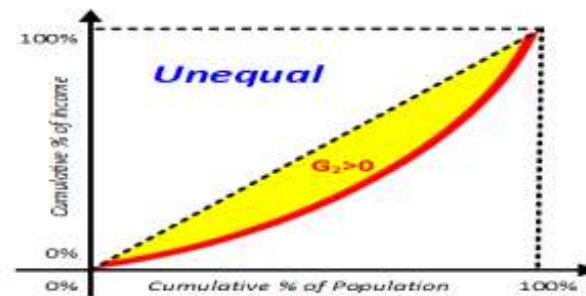
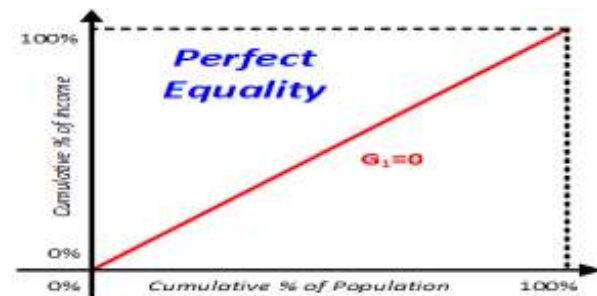
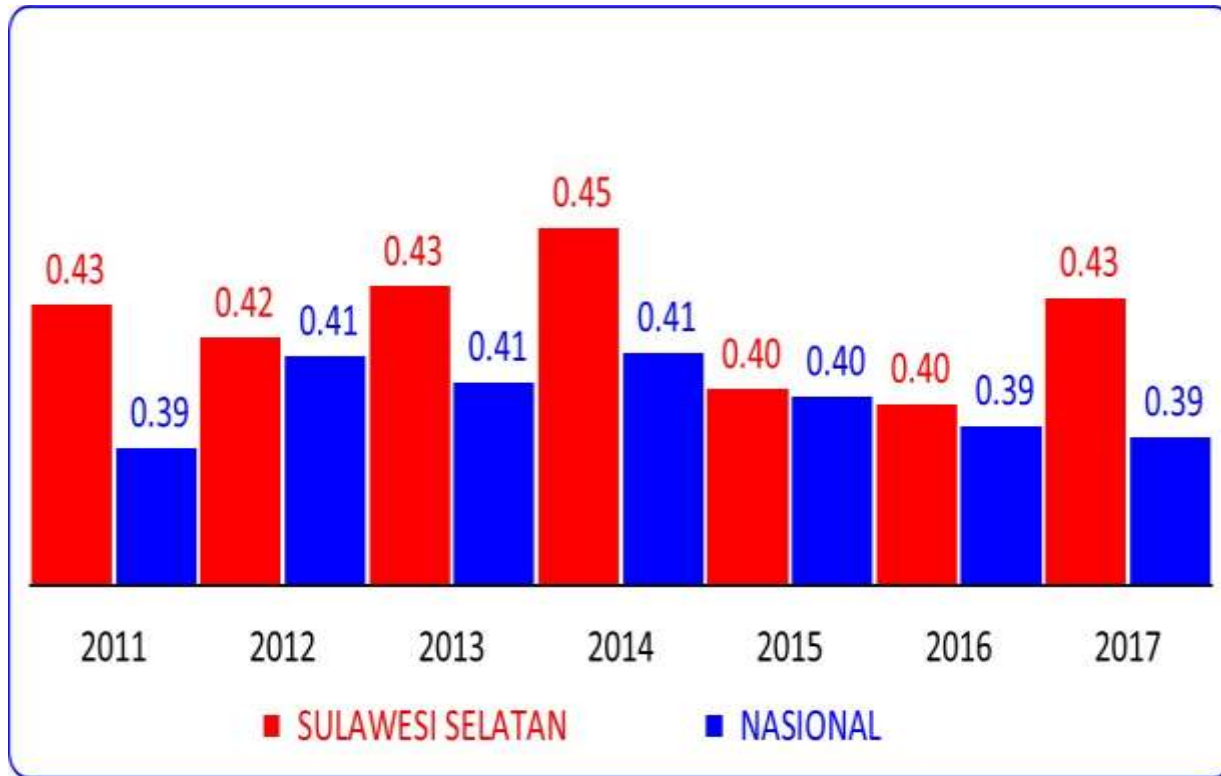
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan



**TPT
PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2011 S/D 2017
"PERIODE AGUSTUS"**



Gini Rasio di Sulawesi Selatan



Dampak Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan Terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Kesenjangan (1/3)

PROVINSI	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)			TINGKAT KEMISKINAN			GINI RASIO		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
SULAWESI UTARA	9.03	6.18	7.18	8.98	8.20	7.90	0.36	0.39	0.39
SULAWESI TENGAH	4.10	3.29	3.81	14.07	14.09	14.22	0.42	0.37	0.37
SULAWESI SELATAN	5.95	4.80	5.61	10.12	9.24	9.48	0.39	0,41	0.44
SULAWESI TENGGARA	5.55	2.72	3.30	13.74	12.77	11.97	0.41	.0.40	0.41
GORONTALO	4.65	2.76	4.28	18.16	17.63	17.14	0.39	0.40	0.40
SULAWESI BARAT	3.35	3.33	3.21	11.90	11.19	11.18	0.38	0.44n :	0.39
SULAWESI	5.73	4.21	4.95	11.67	10.97	10.93			
NASIONAL	6.18	5.61	5.50	11.13	10.70	10.12	0.42	0.41	0.40
PERTUMBUHAN EKONOMI									
SULAWESI SELATAN	7.19	7.42	7.23						
NASIONAL	4.88	5.02	5.07						

Catatan : TPT Nasional 2018 (Feb 2018) 5,13 % dan pertumbuhan ekonomi Kw 1 2018, 5,06 %

Dampak Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan Terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Kesenjangan (2/3)

Pertumbuhan tinggi dan stabil Sulawesi Selatan serta pertumbuhan yang rendah dari nasional mempunyai dampak besaran yang hampir sama terhadap pengangguran, kemiskinan, dan gini rasio

PROVINSI	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)			TINGKAT KEMISKINAN			GINI RASIO		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
SULAWESI SELATAN	5.95	4.80	5.61	10.12	9.24	9.48	0.39	0,41	0.44

SULAWESI SELATAN	7.19	7.42	7.23
NASIONAL	4.88	5.02	5.07

Adanya peningkatan pengangguran dan kemiskinan dari 2016-2017 akibat penurunan pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat dari 7,42% ke 7,23%.

NASIONAL	6.18	5.61	5.50	11.13	10.70	10.12	0.42	0.41	0.40
----------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil tsb belum berdampak pada kesenjangan pendapatan, namun meningkat dari 0.39 (2015) menjadi 0.44 (2017)

- Pola investasi sebagian besar padat modal → kurang tersedia lapangan pekerjaan
- Pola investasi secara spasial masih bertumpuk di hanya sedikit kota dan kabupaten
- Terjadi transformasi struktur ekonomi (2010-2016) – tidak signifikan berdampak terhadap perubahan struktur tenaga kerja
 - Sektor industri pengolahan tidak menyerap banyak tenaga kerja, dan terjadi penumpukan tenaga kerja masih tinggi di sektor pertanian.
 - Sektor pertanian menyerap 43,83% tenaga kerja,
 - Sektor industri pengolahan 6,19%, dan
 - Sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,50%

4. Peranan SDGs/TPB Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif



Kemajuan pada satu dimensi membutuhkan keterlibatan aktif dimensi lain



Katalis untuk kemitraan internasional



Kepemilikan bersama



SDGs sebagai kerangka komprehensif, terintegrasi dan tidak terpisahkan

Prinsip Universal SDGs bertujuan untuk kemajuan semua bangsa di dunia

Tantangan Terbesar:

Memastikan pertumbuhan yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan untuk semua

- TPB/SDGs menawarkan kerangka pelaksanaan yang fokus pada pengurangan kesenjangan dan memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal

Geografi Indonesia:

- Negara Kepulauan Terbesar (17,000 pulau)
- Negara Keempat dengan Populasi Terbesar (255 Juta Orang)

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi

Berkurangnya tingkat pengangguran dan koefisien gini

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

CATALYTIC GOALS (Pengungkit)



ACCELERATOR GOALS (Pemercepat)



END GOALS (Tujuan Akhir)



Pengarusutamaan dan Kesesuaian TPB/SDGS dengan RPJMN 2015-2019

PILAR/GOAL	#TARGET GLOBAL	#TARGET RPJMN 2015-2019	HIGHLIGHT BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL
SOSIAL (1, 2, 3, 4, 5)	47	25	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Kemiskinan • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat • Peningkatan Kedaulatan Pangan • Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat • Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal
EKONOMI (7, 8, 9, 10, 17)	54	30	<ul style="list-style-type: none"> • Kedaulatan Energi • Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional • Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja • Membangun Konektivitas Nasional • Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah • Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif
LINGKUNGAN (6, 11, 12, 13, 14, 15)	56	31	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan Air • Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman • Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan → RAN Pengurangan Emisi GRK • Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan • Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana • Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia
HUKUM DAN TATA KELOLA (16)	12	8	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI • Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan • Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
TOTAL	169	94	

- TPB/SDGs selaras dengan misi Pemerintah dalam *Nawacita*
- **94 target dari 169 target SDGs** telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Tujuan 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

1. Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita;
2. Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi;
3. Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif;
4. Target 8.5 Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;
5. Target 8.6 Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan;
6. Target 8.7 Mengambil tindakan cepat untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia;
7. Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman;
8. Target 8.9 Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk promosi pariwisata berkelanjutan;
9. Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik;



Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara



Target
10.1

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk;

Target
10.3

Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil;

Target
10.4

Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif;

Target
10.7

Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab.

5. Kebijakan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

TIGA (3) ISU UTAMA KESENJANGAN



Kesenjangan
Antarkelompok
Pendapatan



Kesenjangan
Antarwilayah



Kesenjangan
Kepemilikan
Aset Tanah

Kebijakan

Penguatan Kebijakan
Ketenagakerjaan

Peningkatan Konektivitas
Antarwilayah

Peningkatan Akses terhadap
Lahan dan Modal

Kebijakan Afirmatif Pemerataan Antarkelompok Pendapatan dan Percepatan Penurunan Kemiskinan



Penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

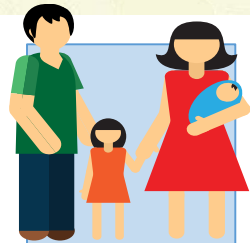


Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan



Pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk menumbuhkan kemampuan ekonomi produktif

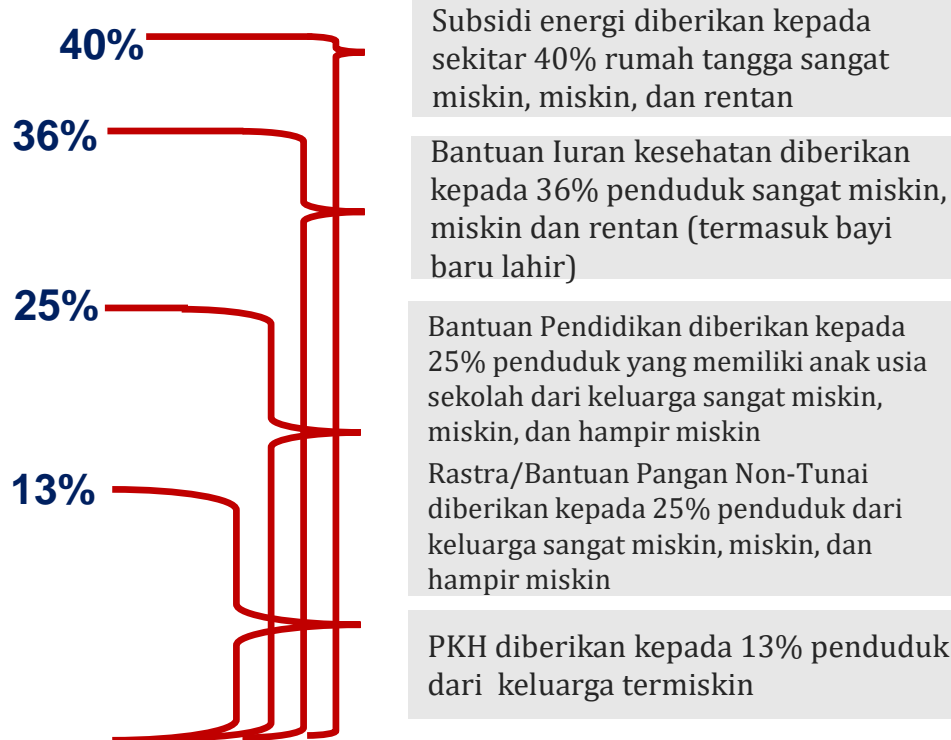
Mengurangi Beban Masyarakat Kurang Mampu



100%
Penduduk

Basis Data Terpadu memuat individu karakteristik anggota rumah tangga, mencakup 40 persen penduduk kelompok pendapatan terbawah.

**CAKUPAN PROGRAM
BANTUAN/SUBSIDI**



Subsidi energi diberikan kepada sekitar 40% rumah tangga sangat miskin, miskin, dan rentan

Bantuan Iuran kesehatan diberikan kepada 36% penduduk sangat miskin, miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir)

Bantuan Pendidikan diberikan kepada 25% penduduk yang memiliki anak usia sekolah dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin

Rastra/Bantuan Pangan Non-Tunai diberikan kepada 25% penduduk dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin

PKH diberikan kepada 13% penduduk dari keluarga termiskin

Perkiraan Status Sosial Ekonomi Terbawah

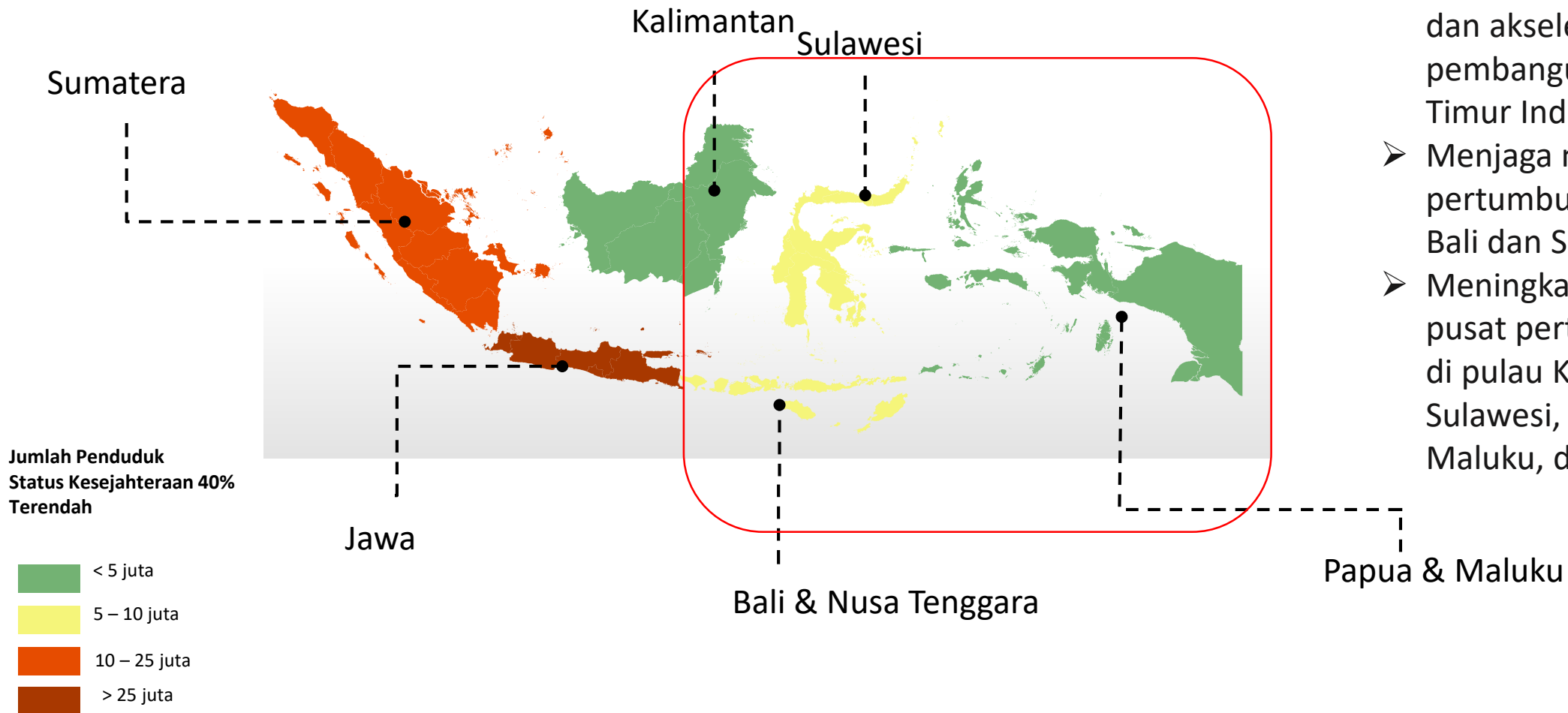
Kondisi Kesejahteraan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu
Rentan Miskin	9,0 Juta	9,5 Juta	32,2 Juta
Hampir Miskin	9,3 Juta	9,7 Juta	32,9 Juta
Miskin	2,3 Juta	2,4 Juta	8,7 Juta
Sangat Miskin	5,1 Juta	5,4 Juta	19,1 Juta
TOTAL	25,8 Juta	27,7 Juta	93,0 Juta*)

Keterangan:

* Belum seluruhnya mencakup daerah dengan kondisi geografis sulit seperti Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sangat miskin : kurang dari 0,8 Garis Kemiskinan
 Miskin : Sekitar GK (0,8-1)
 Hampir miskin : sekitar 1,2 GK
 Rentan miskin : sekitar 1,5 GK

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah:



- mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
- Menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;
- Meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

3. Penutup

- Pembangunan Ekonomi Sulawesi dan juga Sulawesi Selatan selama 7 tahun terakhir tumbuh pada tingkat yang tinggi dan stabil melebihi nasional dan wilayah lainnya di Indonesia.
- Hampir semua sektor yang ada di Sulawesi tumbuh tinggi.
 - Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rata-rata tumbuh 5,94% dan tumbuh cukup tinggi di seluruh provinsi.
 - Sektor industri pengolahan rata-rata tumbuh 9,45%; sektor perdagangan besar dan eceran.
 - Sektor pertambangan dan penggalan berkontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi rata-rata 7,47%, namun aktivitas pertambangan dan penggalan hanya terkonsentrasi di Sulawesi Tengah dengan tambang nikel, dan Sulawesi Tenggara dengan tambang Migas.
- Pertumbuhan ekonomi, khususnya, Sulawesi Selatan yang tinggi dan stabil tidak dibarengi oleh kualitas yang tinggi. Dampaknya terhadap penurunan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan masih kurang berkualitas dibandingkan dengan dampak nasional
- Salah satu kebijakan global dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi adalah melalui SDGs melalui salah satunya adalah pilar ekonomi.
- Kebijakan pembangunan inklusif untuk mengurangi kesenjangan adalah kebijakan: penguatan kebijakan ketenagakerjaan; peningkatan konektivitas antarwilayah; dan kebijakan peningkatan akses terhadap lahan dan modal.



Terima Kasih

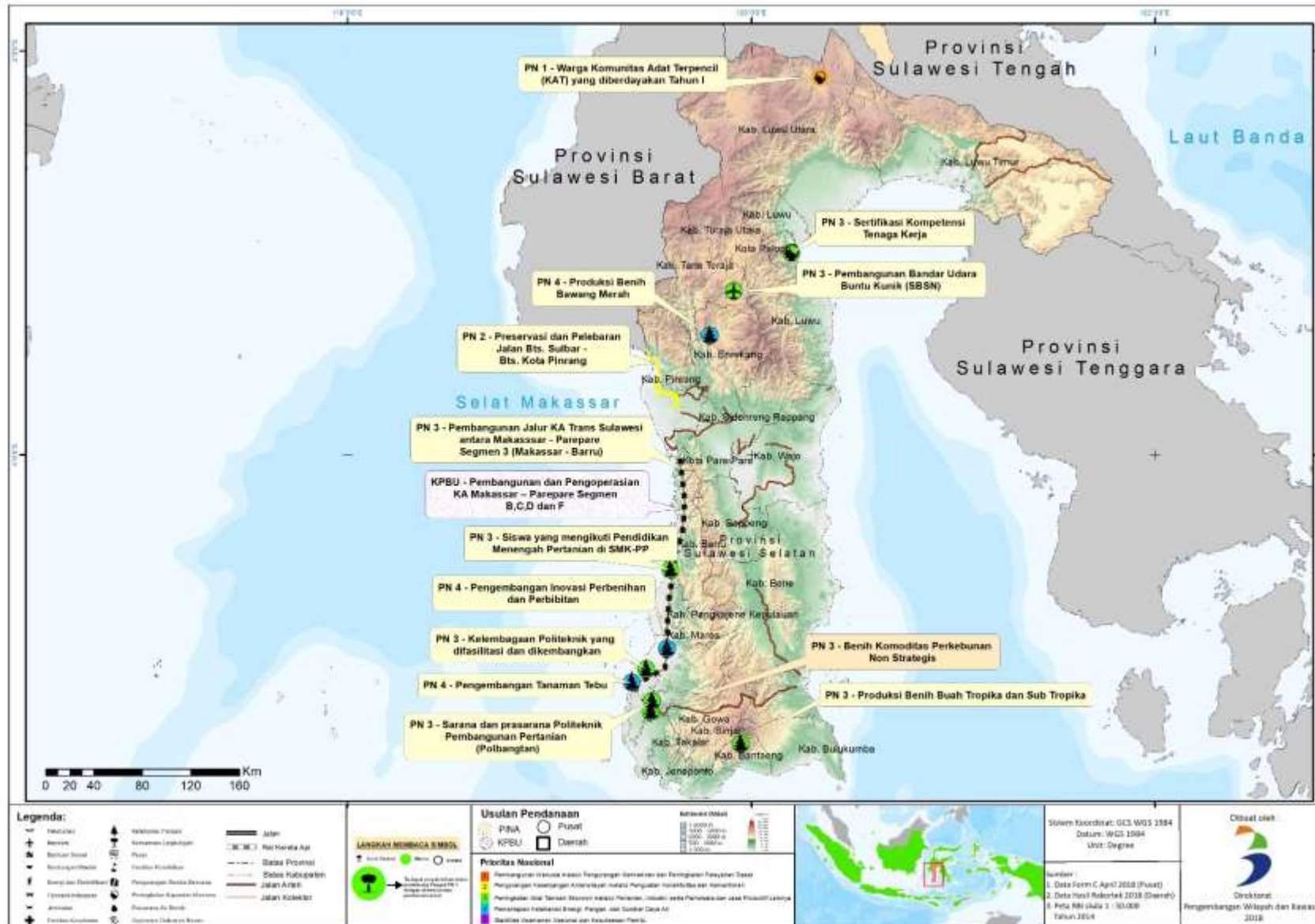


Lampiran



Integrasi Pembangunan Sulawesi Selatan

Integrasi Pembangunan APBN dan KPBU



Prioritas Nasional 1

APBN

- Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial
- Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
- Lanjut Usia Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
- PSKS Perorangan Yang Mendapatkan Pemberdayaan
- Usaha Mikro Yang Mendapat Pendampingan Sertifikasi Tanah
- Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan Tahun I

DAK

- Penyediaan Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Kekurangan Energi
- Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan RSUD Rujukan Regional - RSUD Tanriawaru Bone
- Penyediaan Sarana Prasana Kesehatan Lingkungan Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit di Kabupaten Enrekang

Prioritas Nasional 2

APBN

- Korban Bencana Alam Yang Mendapat Penanganan Darurat
- Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
- BUMDesa Bersama yang dikembangkan
- Kawasan Perdesaan yang memiliki Potensi Sumber Daya Alam Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
- Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Sulbar - Bts. Kota Pinrang
- Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)(SBSN)
- Pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana

KPBU

- Pembangunan dan Pengoperasian KA Makassar – Parepare Segmen B,C,D dan F
- Preservasi Reahabilitasi Jalan Lintas Barat Sulawesi

Prioritas Nasional 3

APBN

- Pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik (SBSN)
- Pembangunan Jalan Akses Bandara Buntu Kunik
- Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sulawesi Selatan Binalattas
- Pembangunan Jalan Bypass Maminasata
- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Binalattas
- Preservasi Jalan Bantaeng - Bulukumba
- Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar
- Pengembangan Tanaman Rempah

DAK

- Peningkatan Jalan
- Penyediaan Alat Produksi Utama - Sektor Industri dan Industri Kreatif
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemerataan Kualitas SMK
- Penyediaan Peralatan Penunjang Gudang SRG
- Pembangunan Gudang SRG tanpa CAS

Prioritas Nasional 4

APBN

- Pembangunan Bendungan Karalloe
- Pembangunan DI Baliase
- Pembangunan Bendungan Pamukkulu
- Revitalisasi Danau Tempe
- Pembangunan Kolam Regulasi Nipa-Nipa
- Pembangunan Bendungan Paselloreng
- Pembangunan Bendungan Jenelata
- Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya
- Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani

DAK

- Pembangunan/Peningkatan Irigasi di Daerah Lumbung Pangan Nasional di Kab. Jeneponto
- Rehabilitasi Irigasi Waduk di Kab. Bone, Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab. Wajo, dan Kota Makassar

Prioritas Nasional 5

APBN

- Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial (APBN)

Pipeline Proyek PINA Selanjutnya

24 proyek dengan total nilai proyek Rp 279,6 triliun



1



PT Utama Marga Waskita - Jalan Tol di Sumatera Utara
(Rp 13,4 triliun/ USD 1.010 juta)

2



PT PJB - Pembangkit Listrik (7 Proyek)
(Rp 60,5 triliun/ USD 4.481 juta)

3



PT Indonesia Power - Pembangkit Listrik (8 Proyek- termasuk 1 proyek EBTKE)
(Rp 86,8 triliun/ USD 6.420 juta)

4



PT PLN - Pembangkit Listrik (2 Proyek) & Transmisi Listrik
(1 Proyek)
(Rp 46,9 triliun/ USD 3.480 juta)

5



BIJB (Pengembangan Fase 2 & Aerocity –
2 Proyek)
(Rp 30 triliun/ USD 2.200 juta)

6



Pesawat R-80 – PT RAI
(Rp 21,6 triliun/ USD 1.600 juta)

7

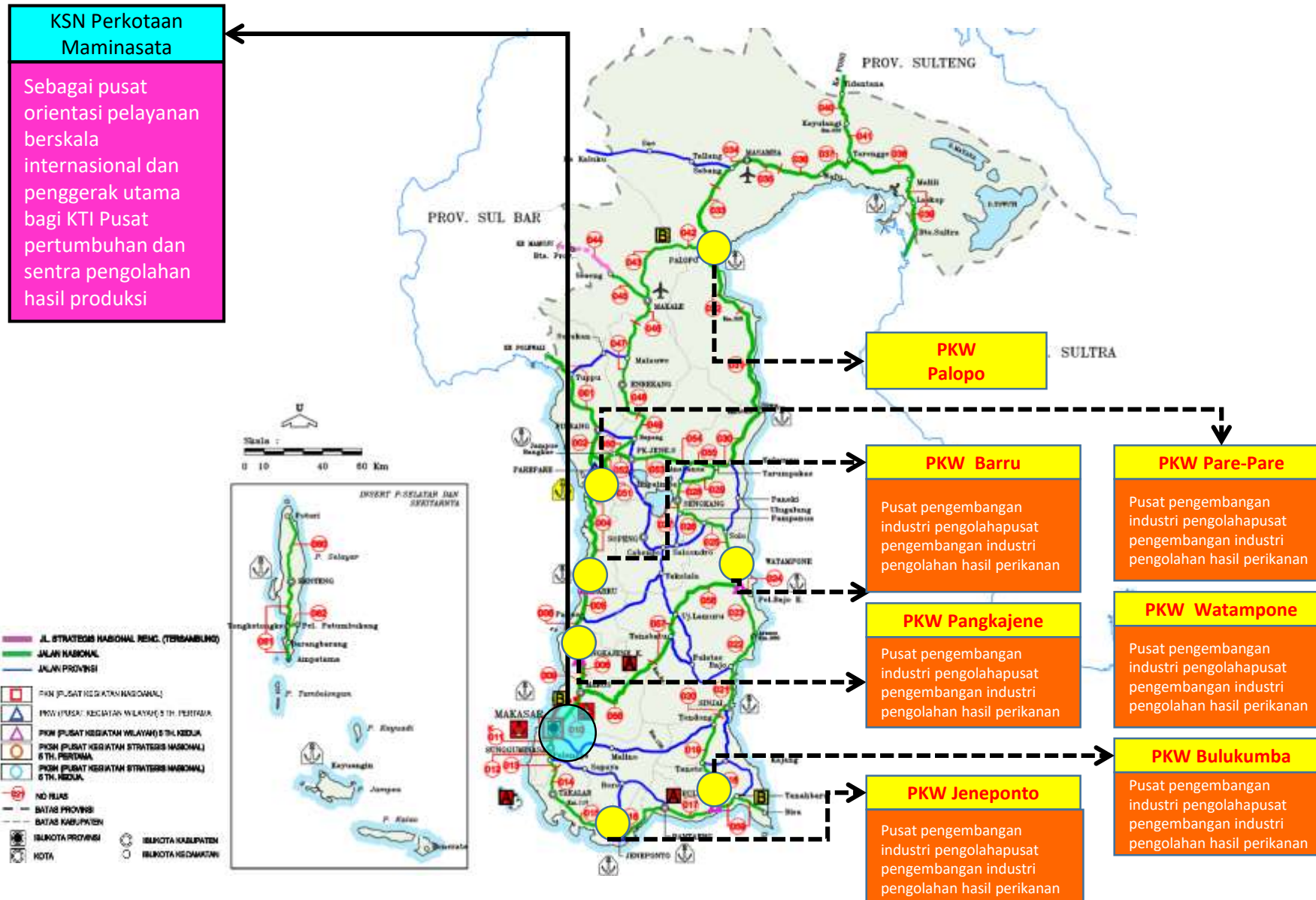


Pengembangan Area Terintegrasi Pulau Flores –
Flores Prosperindo, Ltd.
(Rp 13,5 triliun/USD 1.000 juta)



Arah Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan

Arah Pengembangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan



Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare
Segmen 3 (Makassar - Barru)(SBSN)

Preservasi Jalan Bts. Prov. Sulbar - Bts. Kota Pinrang
(Lintas Barat Sulawesi)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Sulbar -
Bts. Kota Pinrang

Pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik (SBSN)



PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK PRIORITAS	PROVINSI	RENCANA TAHUN 2019	
		KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB
Preservasi Jalan Bts. Prov. Sulbar - Bts. Kota Pinrang (Lintas Barat Sulawesi)	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	Kemenpupera
Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Sulbar - Bts. Kota Pinrang	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	Kemenpupera
Pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik (SBSN)	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	Kemenhub
Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)(SBSN)	Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Kota Pare Pare	Kemenhub
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Transportasi Laut	Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua	Tangerang, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang dan Jayapura	Kemenhub
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Transportasi Laut	DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Sumatera Barat	Jakarta, Semarang, Makassar, Tangerang, Surabaya, Barombong, Sorong, Aceh, Minahasa Selatan dan Padang Pariaman	Kemenhub